Gerak Cepat Pelayanan: 100 Hari Transformasi Layanan Masyarakat Aceh Barat

100 Hari Pertama Tarmizi - Said: Tata Kelola Pemerintahan yang Menyentuh Akar Rumput

HARI-HARI awal pemerintahan Bupati Tarmizi dan Wakil Bupati Said menjadi saksi dari perubahan paradigma kepemimpinan di Aceh Barat. Tak ingin terjebak dalam rutinitas birokrasi, mereka memilih langkah yang berbeda: turun langsung ke desa-desa, menyapa warga, dan menyimak keluhan mereka dari jarak yang paling dekat.

Aceh Barat mencatat babak baru dalam sejarah pemerintahan daerahnya. Dalam 100 hari pertama masa jabatan, pasangan Bupati Tarmizi dan Wakil Bupati Said menunjukkan bahwa pemerintahan bukan hanya soal administrasi, melainkan tentang kehadiran nyata di tengah masyarakat. Mereka memilih untuk tidak hanya memimpin dari balik meja, tapi juga hadir langsung ke desa-desa, menyapa rakyat yang selama ini jarang disentuh kebijakan secara langsung.

Salah satu langkah paling berani adalah ketika keduanya memutuskan berkantor di desa-desa terpencil. Di tempat-tempat yang bahkan jaringan komunikasi masih terbatas, Bupati dan Wakil Bupati mendengarkan suara rakyat secara langsung. Aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan, dicatat dan ditindaklanjuti secara konkret.

Langkah ini memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Pemerintah bukan hanya pengambil keputusan, tapi juga pendengar dan pelaksana amanah rakyat. Dengan model kepemimpinan yang menyatu dengan denyut nadi desa, rasa kepercayaan masyarakat pun tumbuh semakin kuat.

Namun, pendekatan lokal tidak cukup tanpa dukungan pusat. Oleh karena itu, Bupati Tarmizi aktif menjalin komunikasi dengan kementerian di Jakarta. Ia tak segan-segan membawa proposal dan data, berjuang agar Aceh Barat tidak hanya menjadi penonton pembangunan nasional, tetapi juga turut menikmati hasilnya.

Perjuangan itu membuahkan hasil nyata. Lebih dari 500 miliar rupiah berhasil dibawa pulang untuk mendukung berbagai program unggulan. Di antaranya adalah pendirian Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang menyasar masyarakat miskin dan daerah pelosok yang selama ini luput dari perhatian.

Namun Tarmizi - Said paham bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan angka-angka dan infrastruktur. Kehidupan masyarakat juga harus dijaga dari sisi nilai dan spiritualitas. Karena itu, pemerintah daerah mengajak para ulama untuk duduk bersama, menjadi mitra dalam merancang kebijakan.

Dengan konsep Umara dan Ulama Membangun, setiap keputusan strategis diambil melalui proses musyawarah dan muzakarah bersama para ulama. Ini bukan sekadar simbol keislaman, melainkan langkah konkret agar kebijakan pemerintah berpijak pada etika, moral, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Seratus hari kepemimpinan Tarmizi - Said telah menghadirkan harapan baru bagi Aceh Barat. Dengan pendekatan yang merakyat, kerja keras di pusat, dan kemitraan spiritual dengan ulama, mereka menunjukkan bahwa perubahan bukan sekadar wacana, tetapi kerja nyata yang menyentuh hati dan kebutuhan rakyat.(*)

Penulis : Hidayat Isa Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsa Aceh Barat

PENGHARGAAN

• TAHUN 2025

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke II dari BPK RI Perwakilan Aceh
- Piagam Penghargaan atas prestasi telat berhasil percepat pembentukan koperasi merah putih dari Gubernur Aceh
- Penghargaan dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh
- Aceh Barat raih juara TP2DD dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh
- Penganugerahan predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Keadilan untuk Semua: Inisiatif Bantuan Hukum Gratis dari Kepemimpinan TARSA di Aceh Barat

DI pelosok-pelosok Aceh Barat, masih banyak warga yang memilih diam ketika menghadapi persoalan hukum. Bukan karena tak ingin membela diri, melainkan karena tak tahu harus ke mana mencari bantuan, atau bahkan karena merasa keadilan bukan untuk mereka. Ketidakadilan yang berulang membuat sebagian masyarakat pasrah dalam kesunyian, seakan suara mereka tak berarti di hadapan hukum yang rumit dan mahal.

Melihat kenyataan ini, Bupati Aceh Barat Tarmizi SP dan Wakil Bupati Said Fadheil SH tak tinggal diam. Kepemimpinan mereka, yang dikenal dengan singkatan TARSA, percaya bahwa hukum bukan hanya untuk mereka yang mampu membayar pengacara mahal, melainkan juga untuk mereka yang terpinggirkan, tak bersuara, dan selama ini hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan.

Pada 9 Mei 2025, sebuah langkah besar diambil. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga lembaga bantuan hukum, yakni Yayasan Karib Insan Madani, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), dan Lembaga Bantuan Hukum SATA Al Faqih. Tujuannya jelas: memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Program ini lahir dari kesadaran bahwa negara, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk hadir di tengah rakyat dalam setiap persoalan, termasuk persoalan hukum. Di bawah kepemimpinan TARSA, keadilan menjadi milik bersama, bukan hanya milik mereka yang kuat secara ekonomi dan sosial.

Bupati Tarmizi menegaskan bahwa bantuan hukum ini bukan sekadar program simbolis. Ia ingin memastikan bahwa masyarakat di setiap pelosok Aceh Barat memiliki akses yang sama terhadap keadilan. "Kita tidak ingin ada lagi warga kita yang menangis dalam diam karena tak tahu harus bagaimana membela diri. Negara harus hadir untuk mereka," ujarnya tegas.

Wakil Bupati Said Fadheil SH, yang memiliki latar belakang hukum, menambahkan bahwa sinergi dengan lembaga bantuan hukum ini akan memperluas jangkauan layanan hukum ke gampong-gampong. Ia menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka tidak hanya dibantu ketika terjerat masalah, tetapi juga bisa memahami dan melindungi hak-hak mereka sejak awal.

Ketiga lembaga bantuan hukum yang digandeng telah berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara profesional dan manusiawi. Mereka akan menempatkan advokat di lokasi-lokasi strategis, serta membuka layanan konsultasi yang dapat diakses secara langsung dan daring oleh masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin, petani kecil, nelayan, buruh harian, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya. Mereka yang selama ini kerap terabaikan oleh sistem kini punya tempat untuk mencari keadilan tanpa takut dengan biaya dan proses hukum yang panjang.

Kepemimpinan TARSA membuktikan bahwa keadilan bukan milik segelintir orang. Dengan hadirnya program bantuan hukum gratis ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan bahwa keadilan adalah hak setiap manusia — dan negara, dengan segala kewenangannya, wajib memastikan keadilan itu sampai ke tangan yang paling membutuhkan.(*)

Penulis : Hidayat Isa Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsa Aceh Barat

Program Nyata 100 Hari Kerja TARSA, Permudah Akses Kesehatan untuk Warga Aceh Barat

DALAM waktu kurang dari 100 hari masa kepemimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM dan Said Fadheil, SH (Pemerintahan TARSA), telah merealisasikan tiga program unggulan di bidang kesehatan: Kartu Aceh Barat Sehat (KABS), rumah singgah di Banda Aceh, serta layanan Dokter Masuk Rumah (Dokmaru). Program-program ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendapat apresiasi luas

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di bawah kepemimpinan Bupati Tarmizi, SP., MM dan Wakil Bupati Said Fadheil, SH, terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Di bidang kesehatan, hanya tiga hari setelah dilantik oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Barat pada Rabu, 19 Februari 2025, Pemerintahan TARSA langsung meluncurkan program Kartu Aceh Barat Sehat (KABS) pada Senin, 3 Maret 2025.

Peluncuran dilakukan di halaman IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, khususnya Banda Aceh.

Hingga Minggu, 25 Mei 2025, tercatat sebanyak 241 warga telah memanfaatkan layanan ini. Program ini memberikan dukungan pendampingan dan bantuan biaya sebesar Rp1 juta bagi pasien yang dirujuk ke berbagai rumah sakit, antara lain RSUD Zainoel Abidin, RS Meuraxa, RS Kesrem, RS Ibu dan Anak, RS Harapan Bunda, RS Perta Medika, serta RS Adam Malik di Medan, Sumatera Utara.

Salah satu penerima manfaat, Ibnur Hajar, warga Desa Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo, mengaku sangat terbantu. Ia menggunakan KABS saat mendampingi ibunya berobat di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh.

"Biaya rujukan sebesar satu juta rupiah dari Pemkab sangat membantu kami. Harapan saya, program ini terus berlanjut karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat," ujarnya, Selasa, 27 Mei 2025.

Tak berhenti di situ, tiga hari setelah peluncuran KABS, tepatnya pada Kamis, 6 Maret 2025, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat meresmikan rumah

singgah bagi warga Aceh Barat di Banda Aceh, yang berlokasi di Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala.

Rumah singgah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit di ibu kota provinsi.

Rumah singgah tersebut tidak hanya menyediakan tempat beristirahat, mandi, dan tidur secara gratis, tetapi juga menyediakan tiga kali makan sehari. Hingga akhir Mei 2025, lebih dari 200 warga Aceh Barat telah memanfaatkan rumah singgah ini, baik yang sedang berobat maupun yang telah selesai menjalani perawatan.

Selain dua program tersebut, Pemerintahan TARSA juga menjalankan program unggulan ketiga yakni Dokter Masuk Rumah (Dokmaru). Program ini memungkinkan tim medis bersama Bupati mengunjungi langsung rumah warga yang mengalami sakit menahun atau gangguan jiwa (ODGJ).

Dengan terealisasinya tiga program unggulan dalam waktu kurang dari 100 hari kerja, Pemerintahan TARSA menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan menyeluruh bagi masyarakat Aceh Barat.(*)

Penulis : Juli Saidi Jurnalis TITIK.Co

Rekomendasi Muzakarah Ulama Jadi Tonggak Penguatan Syariat Islam di Aceh Barat

SUASANA ruang kerja Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, terasa berbeda pada Jumat pagi, 21 Maret 2025. Deretan tamu berpeci dan berjubah duduk rapi, membawa misi mulia: menyerahkan hasil Muzakarah Ulama Aceh Barat yang diselenggarakan pada 8 Maret 2025 lalu. Sebuah langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Syariat Islam di wilayah barat Aceh itu.

Dipimpin oleh Abu Mahmudin, pimpinan Pesantren Serambi Aceh, para ulama datang mewakili suara dan harapan umat. Mereka tak datang sendiri, melainkan bersama tokoh-tokoh penting lainnya seperti Abon Arifin, Tgk Abdurrani, dan Waled Harmen. Rekomendasi yang mereka bawa merupakan hasil pemikiran kolektif dari para ulama dayah, akademisi, hingga para imum chik dari 321 gampong di Aceh Barat.

Bupati Tarmizi menyambut rekomendasi tersebut sebagai pijakan penting dalam menyusun roadmap Syariat Islam yang lebih terarah, aplikatif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. "Ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah jalan untuk memastikan bahwa Syariat Islam tidak hanya menjadi simbol, tapi hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari,"

Selain itu, juga penghentian seluruh aktivitas dan penutupan tempat usaha saat adzan berkumandang sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu ibadah. Pengaktifan kembali majelis ta'lim di tingkat desa. Implementasi langsung dari instruksi Gubernur Aceh tentang revitalisasi kehidupan religius masyarakat.

Langkah ini tidak hanya bersifat religius semata, tapi juga membangun budaya spiritual yang kuat dan kolektif. "Kami ingin nilai-nilai Islam hidup, tumbuh, dan membentuk masyarakat yang beradab dan bersatu," ujar Abu Mahmudin usai menyerahkan dokumen rekomendasi.

Aceh sebagai daerah dengan kekhususan dalam penerapan Syariat Islam, memang memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tapi juga edukatif dan partisipatif. Bupati Tarmizi pun menegaskan, bahwa pendekatan ini akan melibatkan semua elemen masyarakat tokoh adat, pemuda, perempuan, dan lembaga Pendidikan agar Syariat Islam dijalankan dengan kebijaksanaan dan kearifan lokal.

"Penerapan Syariat Islam harus terasa sebagai kebutuhan, bukan paksaan. Pemerintah hadir bukan untuk menghakimi, tapi mendampingi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan Islami," tambah Tarmizi.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Aceh Barat ingin mencetak generasi Qurani dan membentuk lingkungan sosial yang Islami dari tingkat keluarga hingga ke pemerintahan. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai ibadah, pendidikan agama, dan kebersamaan di masjid, diharapkan masyarakat akan lebih kuat menghadapi tantangan zaman.(*)

Penulis : Sa'dul Bahri Jurnalis Serambi Indonesia

Refleksi 100 Hari Kepemimpinan TARSA, Akademisi Angkat Bicara

SERATUS hari kepemimpinan pasangan Bupati Tarmizi dan Wakil Bupati Said Fadheil (TARSA) di Aceh Barat menjadi momentum awal yang penting untuk menakar arah perubahan. Sebagai akademisi, kami menyadari bahwa masa 100 hari bukanlah ukuran absolut, namun cukup untuk menangkap getar langkah awal dan niat baik dari kepemimpinan yang baru.

Ada harapan yang mulai tumbuh di tengah masyarakat Aceh Barat, ditandai dengan hadirnya beberapa inisiatif yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kepemimpinan yang mengedepankan kedekatan emosional dengan rakyat memberi sinyal bahwa TARSA hadir bukan hanya sebagai pengelola pemerintahan, tetapi juga sebagai pelayan harapan rakyat.

Program kesehatan seperti Kartu AcehBaratSehat (KABS), rumah singgah, dan Dokmaru mencerminkan kebijakan yang berbasis pada empati dan keadilan sosial.

Dalam pandangan kami, program-program ini memiliki kedalaman makna, sebab bukan hanya menyasar aspek fisik dari kesehatan, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan sosial masyarakat miskin yang selama ini terabaikan.

Kepemimpinan yang merasakan penderitaan rakyat—dan bergerak untuk menguranginya adalah wujud dari kepemimpinan yang intuitif dan penuh welas asih. Sebagai akademisi, kami berharap keberlanjutan program ini mendapat perhatian khusus, terutama dalam aspek pembiayaan dan sumber daya manusia.

Program bantuan hukum gratis juga menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan TARSA menempatkan keadilan sebagai fondasi pembangunan. Upaya menggandeng lembaga-lembaga bantuan hukum lokal memperlihatkan adanya keberpihakan kepada kelompok marjinal. Namun, pelaksanaan program ini masih membutuhkan penguatan, terutama dalam aspek sosialisasi dan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

Ke depan, kami melihat pentingnya membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa program-program ini tidak hanya berjalan, tetapi tumbuh menjadi budaya baru pemerintahan yang humanis dan berpihak pada rakyat.(*)

Dr. AFRIZAL TJOETRA, M.Si
Dosen Pada Jurusan Sosiologi Program Magister, FISIP Universitas Teuku Umar

1 juta rupiah bagi pasien rujukan, membantu kami dimasa sulit

SEJAK diluncurkan pada Maret lalu, program Kartu Aceh Barat Sehat (KABS) telah memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Program ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga. Dalam waktu seratus hari kerja, Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi, bersama Wakil Bupati Bapak Said Fadheil, menunjukkan komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas bantuan uang tunai sebesar satu juta rupiah untuk kami pasien rujukan, melalui program Aceh Barat Sehat. Bantuan ini sangat membantu kami, khususnya di masa sulit seperti sekarang.

Sebagai penerima manfaat, kami merasa sangat bersyukur atas kepemimpinan Bapak Tarmizi dan Bapak Said yang responsif dan berpihak kepada rakyat kecil. Semoga program-program seperti ini terus berlanjut dan berkembang, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Barat. Kami mendoakan agar Bapak Bupati dan Wakil Bupati senantiasa diberi kekuatan dan kebersamaan dalam memimpin daerah ini ke arah yang lebih baik.(*)

SYARBINI
Penerima manfaat Kartu Aceh Barat Sehat